

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Guna Mengoptimalkan Pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia

Shabiha Elena Putri¹, Welly Gosal²

^{1,2} Universitas Pelita Harapan, Indonesia

E-mail: 01051230174@student.uph¹, 01051230153@student.uph.edu²

Article History:

Received: 10 Maret 2025

Revised: 28 Maret 2025

Accepted: 31 Maret 2025

Keywords: *PTUN, Foreign Direct Investment, Metode Normatif, Kepastian Hukum, Iklim Investasi*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara optimalisasi fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan PTUN terkait kasus investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN yang berfungsi optimal mampu menciptakan kepastian hukum yang meningkatkan kepercayaan investor asing. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, birokrasi yang kompleks, dan tumpang tindih regulasi masih menghambat efektivitas PTUN. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan kelembagaan PTUN, harmonisasi regulasi, dan peningkatan transparansi dalam penyelesaian sengketa investasi guna mendukung pertumbuhan FDI.*

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran krusial dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi dan menegakkan hukum administrasi negara. Fungsi utama PTUN adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara terkait keputusan atau tindakan administratif yang dianggap merugikan (Zuhriyah, 2024). Dengan demikian, PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintah, memastikan bahwa setiap keputusan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, kewenangan PTUN mengalami perluasan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Prahastapa et al., 2017). Undang-undang ini memberikan PTUN kewenangan tambahan untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara (Nupu, 2024). Hal ini memungkinkan PTUN tidak hanya menilai legalitas formal suatu keputusan administratif, tetapi juga menilai substansi dan tujuan dari keputusan tersebut, sehingga dapat mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pejabat publik.

Dalam konteks kebijakan investasi, PTUN memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa administrasi yang berkaitan dengan izin investasi, perizinan usaha, dan kebijakan

pemerintah lainnya yang mempengaruhi iklim investasi. Dengan memastikan bahwa keputusan administratif terkait investasi dibuat sesuai dengan hukum dan prinsip good governance, PTUN dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan (Lase et al., 2024) yang menunjukkan bahwa PTUN berperan strategis dalam menjaga prinsip-prinsip good governance, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya.

Namun, perluasan kewenangan PTUN juga menimbulkan tantangan tersendiri. Perbedaan aturan mengenai kewenangan terkait objek sengketa tata usaha negara terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Perbedaan ini dianggap dapat saling melengkapi satu sama lain dan memberikan perlindungan yang lebih kepada masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peran PTUN dalam mendukung pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim serta aparat PTUN. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan PTUN perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik norma. Dengan demikian, PTUN dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif, sehingga menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia (Maulidina et al., 2023)

Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh kepentingan pengendalian dalam perusahaan di negara tersebut. FDI tidak hanya mencakup transfer modal finansial, tetapi juga melibatkan transfer teknologi, manajemen, dan keterampilan lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi negara penerima (David, 2024). Menurut penelitian oleh (Prawira et al., 2024), FDI memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, karena dapat meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses ke pasar global.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan investor asing dalam melakukan FDI antara lain stabilitas politik dan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, ukuran pasar, kebijakan pemerintah, dan terutama stabilitas hukum. Studi oleh (Afianto & Prakoso, 2023) menunjukkan bahwa lingkungan hukum yang stabil, transparan, dan dapat diandalkan sangat penting dalam menarik investasi asing. Kepastian hukum memberikan jaminan bagi investor terhadap hak milik, perlindungan dari ekspropriasi tanpa kompensasi yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Stabilitas hukum memainkan peran krusial dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Peraturan yang jelas, transparan, dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Penelitian oleh (Rahman & Kelana, 2022) menekankan bahwa perlindungan hukum bagi investor asing, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan aset tanpa kompensasi yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang kuat dapat meminimalkan risiko bagi investor dan mendorong aliran FDI ke Indonesia.

Selain itu, peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa juga menjadi faktor penentu dalam menarik FDI. Menurut (Nawwaf, 2024), sistem peradilan yang efektif dan independen memberikan jaminan bahwa hak-hak investor akan dilindungi dan sengketa akan diselesaikan secara adil dan efisien. Ketiadaan sistem peradilan yang efektif dapat meningkatkan persepsi risiko dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pertumbuhan FDI, Indonesia perlu memastikan

stabilitas hukum melalui peraturan yang jelas dan konsisten, serta sistem peradilan yang efektif. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendorong aliran investasi yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor asing. Sebagai lembaga yang menangani sengketa administrasi antara masyarakat atau badan hukum dengan pemerintah, PTUN memastikan bahwa tindakan administratif pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini menjadi faktor kunci dalam menarik Foreign Direct Investment (FDI), karena investor asing cenderung memilih negara dengan sistem peradilan yang transparan dan dapat diandalkan. (Lintang, 2025) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan peradilan dapat menjadi hambatan signifikan bagi masuknya investasi asing.

Teori hukum menekankan bahwa sistem peradilan yang efektif dan independen berkontribusi pada peningkatan investasi asing. Sistem peradilan yang baik menjamin perlindungan hak-hak investor, memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, dan memastikan bahwa kontrak serta perjanjian dihormati dan ditegakkan. Selain itu, perbaikan sistem peradilan dan hukum merupakan syarat penting dalam menarik investor, karena reformasi konstitusional dan peningkatan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas hukum suatu negara.

Keterkaitan antara PTUN dan FDI juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan hukum terhadap investor asing. Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi investor asing, dan PTUN berperan dalam menegakkan peraturan tersebut. Dengan adanya mekanisme peradilan yang jelas dan transparan, investor merasa lebih aman dalam menanamkan modalnya, karena mereka memiliki jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi oleh hukum.

Selain itu, PTUN juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara investor asing dan pemerintah. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, investor memiliki kepercayaan lebih dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PTUN yang kuat dan independen dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara fungsi PTUN yang efektif dan peningkatan FDI di Indonesia. Sistem peradilan yang baik, termasuk PTUN, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor asing, yang pada gilirannya meningkatkan minat mereka untuk berinvestasi. Oleh karena itu, penguatan PTUN dan sistem peradilan secara keseluruhan menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan aliran investasi asing ke Indonesia.

Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, FDI mencapai 900,2 triliun rupiah (setara dengan \$55,33 miliar), meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama terlihat pada sektor pertambangan dan pemurnian logam, menyusul larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2020 yang bertujuan mengembangkan industri pengolahan nikel domestik. Sumber utama FDI termasuk Singapura, China, dan Hong Kong (Teresia & Sulaiman, 2025).

Kepastian hukum merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum tersebut. PTUN memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap keputusan atau tindakan administratif yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas

dalam pelaksanaan tugas administrasi oleh badan atau pejabat tata usaha negara, PTUN membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Peran PTUN dalam menegakkan hukum administrasi negara berbasis prinsip *good governance* juga signifikan. PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan demikian, PTUN menjadi upaya penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor asing.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan putusan PTUN masih ada. Seringkali, pejabat pemerintahan tidak dapat atau tidak mau melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan, yang dapat mengurangi wibawa PTUN dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan eksekusi putusan pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa keputusan PTUN dihormati dan dilaksanakan, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi investor (Herlambang et al., 2024).

PTUN memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan dapat diprediksi di Indonesia. Dengan menegakkan hukum administrasi yang adil dan transparan, PTUN membantu menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor asing, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan korelasi antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran PTUN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi negara dapat menciptakan kepastian hukum bagi investor asing. Kepastian hukum yang baik diyakini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan mengkaji hubungan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana optimalisasi fungsi PTUN dapat berperan sebagai faktor pendukung pertumbuhan FDI di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum normatif sebagai landasan utamanya. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mendukung pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Metode normatif bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang relevan dengan topik penelitian guna menemukan korelasi antara kepastian hukum yang diciptakan oleh PTUN dengan meningkatnya minat investasi asing langsung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep dasar tentang PTUN, FDI, dan hubungan antara stabilitas hukum dengan kepercayaan investor. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur investasi asing dan kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kebijakan administrasi publik yang berdampak pada investor. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Sumber data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan investasi asing dan PTUN, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu,

.....

penelitian ini juga merujuk pada literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas topik terkait. Data sekunder ini menjadi dasar utama dalam mengkaji bagaimana PTUN berperan dalam menciptakan kepastian hukum yang berpengaruh pada peningkatan investasi asing di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Teknik ini berfokus pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan PTUN yang relevan dengan sengketa administrasi terkait investasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana putusan PTUN dapat memberikan dampak terhadap kepastian hukum yang menjadi faktor penting bagi investor asing dalam mengambil keputusan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran PTUN Dalam Menciptakan Kepastian Hukum bagi Investor

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia. Dengan menegakkan hukum administrasi negara yang berbasis pada prinsip-prinsip good governance, PTUN memastikan bahwa tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi investor.

Studi kasus Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT menunjukkan perluasan kewenangan absolut PTUN dalam menangani tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Dalam putusan ini, PTUN menegaskan bahwa tindakan faktual yang tidak sesuai dengan hukum dapat menjadi objek sengketa di PTUN, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor yang dirugikan oleh tindakan tersebut (Ramadhani et al., 2022).

Eksekusi putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap merupakan langkah efektif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti ketidakpatuhan pejabat administrasi negara terhadap putusan PTUN. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan PTUN.

Kejelasan dan konsistensi putusan PTUN berdampak signifikan terhadap perlindungan investor asing. Putusan yang jelas dan konsisten memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Sebaliknya, ketidakjelasan dan inkonsistensi putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan investor.

Dengan demikian, peran PTUN dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor asing sangat vital. Melalui penegakan hukum yang adil dan transparan, serta eksekusi putusan yang efektif, PTUN dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat peran dan fungsi PTUN harus terus dilakukan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Korelasi Antara Peningkatan Fungsi PTUN Dan Pertumbuhan FDI

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dapat mempengaruhi arus masuk Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Kualitas institusi, termasuk efektivitas PTUN, menjadi faktor penentu dalam menarik investasi asing. Penelitian (Amelia & Sukadana, 2019) menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan yang baik, yang mencakup efektivitas pemerintah dan penegakan hukum, memiliki hubungan kuat dengan aliran masuk FDI di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Data historis menunjukkan bahwa perbaikan dalam kualitas institusi berbanding lurus dengan peningkatan FDI. Penelitian yang menganalisis periode 2015-2021 menemukan bahwa

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan infrastruktur listrik berpengaruh positif terhadap penanaman modal asing, sementara frekuensi kasus pencurian memiliki pengaruh negatif. Meskipun indeks kapasitas fiskal dan penyelesaian tindak kriminal oleh polisi tidak berpengaruh signifikan, temuan ini menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan dalam menarik (Ritonga, 2023).

Selain itu, keterbukaan perdagangan dan stabilitas politik juga berperan dalam menarik FDI. Studi yang menganalisis enam negara ASEAN selama periode 2013-2022 menemukan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki dampak positif signifikan terhadap arus masuk FDI, sementara kerapuhan politik memiliki dampak negatif signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang liberal dan lingkungan politik yang stabil dapat meningkatkan daya tarik investasi asing.

Meskipun demikian, hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat dua arah. Penelitian yang menganalisis data Indonesia dari 1970 hingga 2015 menemukan bahwa tidak ada hubungan kausal antara FDI dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang. Namun, terdapat hubungan kausal satu arah dari pertumbuhan ekonomi ke FDI, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong arus masuk FDI.

Peningkatan fungsi PTUN sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas institusi dapat berkontribusi pada peningkatan arus masuk FDI. Dengan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan, PTUN dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap iklim investasi di Indonesia. Kombinasi antara kualitas institusi yang baik, stabilitas politik, keterbukaan perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing langsung.

Dampak Reformasi PTUN Terhadap Iklim Investasi.

Reformasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa administrasi, PTUN dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing. Kepastian hukum ini esensial untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI), karena investor cenderung memilih negara dengan sistem hukum yang stabil dan dapat diandalkan.

Namun, PTUN menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam mendukung FDI. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan penanaman modal. Ketidaktepatan pembagian kewenangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan menghambat proses investasi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di PTUN dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menangani sengketa investasi. Keterbatasan ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses peradilan, yang pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia.

Proses birokrasi yang kompleks dan berbelit-belit juga menjadi hambatan signifikan bagi investasi. Izin usaha yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi investor seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi yang tidak efisien. Hal ini dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem PTUN dan birokrasi terkait. Upaya seperti penyederhanaan regulasi melalui konsep Omnibus Law dapat menjadi solusi untuk mengurangi tumpang tindih peraturan dan mempercepat proses perizinan. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara optimalisasi fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. PTUN yang berfungsi secara optimal mampu memberikan kepastian hukum bagi investor asing, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Kepastian hukum tersebut meliputi perlindungan terhadap hak-hak investor, penegakan aturan yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan demikian, penguatan peran PTUN berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan investasi asing di Indonesia.

PTUN berperan penting dalam menciptakan stabilitas hukum yang menarik bagi investor asing. Stabilitas hukum ini terwujud melalui putusan-putusan PTUN yang tegas, konsisten, dan berlandaskan prinsip keadilan. Kejelasan dalam putusan PTUN dapat meminimalkan risiko hukum yang dihadapi investor asing, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan stabilitas hukum yang baik, investor memiliki keyakinan lebih besar untuk menanamkan modal dalam berbagai sektor industri di Indonesia.

Untuk mendukung optimalisasi fungsi PTUN, diperlukan langkah strategis dalam penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya ini dapat meliputi peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparatur PTUN, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses administrasi peradilan. Penguatan ini bertujuan agar PTUN dapat menangani kasus-kasus investasi secara lebih efisien dan efektif.

Selain itu, harmonisasi regulasi juga menjadi langkah penting untuk mempercepat proses hukum terkait sengketa administrasi investasi. Tumpang tindih regulasi yang kerap terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan kebingungan di kalangan investor dan memperlambat proses hukum. Oleh karena itu, penyelarasan kebijakan yang terkoordinasi antara berbagai lembaga pemerintah menjadi solusi yang krusial untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif.

Peningkatan transparansi dalam penyelesaian kasus di PTUN juga perlu menjadi prioritas. Transparansi ini mencakup publikasi putusan secara terbuka, pemanfaatan sistem informasi digital yang memudahkan investor dalam memantau perkembangan kasus, serta penerapan standar pelayanan yang jelas. Dengan langkah ini, proses hukum di PTUN akan lebih akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap keadilan hukum di Indonesia.

Dengan dilakukannya optimalisasi fungsi PTUN melalui penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan transparansi, diharapkan iklim investasi di Indonesia dapat terus berkembang secara positif. Langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak signifikan dalam menciptakan stabilitas hukum yang kondusif bagi investasi asing, sehingga Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investor global.

DAFTAR REFERENSI

- Afianto, A. H., & Prakoso, B. (2023). Investasi Asing Dan Fungsi Hukum Dalam Menarik Modal Asing Untuk Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(4), 1183-1190.
- Amelia, D., & Sukadana, I. W. (2019). Analisis korelasi kualitas pemerintahan dan foreign direct investment di lima negara asean studi tahun 2008-2017. *Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(8), 1915-46.
- David, N. (2024). Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut
-

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Indonesian Journal of Law*, 1(10), 284–297.
- Herlambang, P. H., Muhtada, D., Yudhanti, R., Pratama, N. W., Wiguna, C. A., Santalia, M., ... & Safarin, M. H. A. F. (2024). Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Upaya Peningkatan Eksekusi Putusan Pengadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Lase, W. S. K., Kornelis, Y., & Zukriadi, D., (2024). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Publik Berdasarkan Uu No. 30 Tahun 2014. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(6), 11–20. <https://doi.org/10.3783/Causa.V5i6.4297>
- Lintang. (2025). Kepastian Hukum dan Konsistensi Putusan Masih Menjadi Hambatan Masuknya Investasi Asing. (Online). Diakses pada 21 Maret 2025, (<https://ugm.ac.id/id/berita/kepastian-hukum-dan-konsistensi-putusan-masih-menjadi-hambatan-masuknya-investasi-asing/>)
- Maulidina, B., Anzani, S. R., & Kristya, V. N. (2023). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance. *YUSTISI*, 10(1), 196-209.
- Nawwaf, M. H. (2024). *Peran Hukum Dalam Mendorong Investasi Asing*.
- Nupu, A. J. (2024). Kajian Yuridis Kewenangan Ptun Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Privatum*, 13(5).
- Prahastapa, A. M. R., Leonard, L. T., & Putriyanti, A. (2017). Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17386>
- Prawira, A. Y., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2024). Peranan Hukum Perizinan Dalam Kemudahan Investasi Asing Demi Tercapainya Pembangunan Ekonomi. *YUSTISI*, 11(1), 248-260. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16209>
- Rahman, A. I., & Kelana, S. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 92-103.
- Ramadhani, A. Z., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2022). Membedah Putusan Ptun Jakarta No. 230/G/Tf/2019/Ptun-Jkt Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Ritonga, R. K. (2023). Pengaruh kualitas institusi dan kinerja makroekonomi terhadap arus masuk FDI di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2621-2632.
- Teresia, A., & Sulaiman, S. (2022). Indonesia's FDI at \$55.3 bln in 2024. (Online). Diakses pada 21 Maret 2025, (<https://www.reuters.com/markets/asia/indonesias-fdi-553-bln-2024-2025-01-31/>)
- Zuhriyah, U. (2024). *Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara, Tugas, dan Fungsinya*. (Online), Diakses pada 21 Maret 2025, (<https://tirto.id/apa-itu-peradilan-tata-usaha-negara-tugas-dan-fungsinya-di-ri-gT27>)